

## **BAB IV**

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA INGIN BERGABUNG MENJADI ANGGOTA *Trans-Pasific Partnership* (TPP)**

Keadaan Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam dan potensi lainnya seharusnya dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menempatkan diri sebagai negara maju atau negara core. Namun kenyataannya Indonesia masih berada diposisi sebagai negara pinggiran yang disebabkan oleh kondisi Indonesia saat ini terutama kondisi ekonomi. Perjanjian *Trans-pasific Partnership* merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diyakini akan menjadi peluang Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menjadi peluang Indonesia untuk meningkatkan posisi kelasnya menjadi negara maju atau negara core.

### **A. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **A.1. Keadaan Ekonomi Domestik Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 93.000 km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km. Negara ini berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perairan dunia sehingga sangat menguntungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah jalur laut yang menghubungkan laut dari Aceh hingga Papua antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Jalur laut ini merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk mengembangkan negaranya. Selain itu melalui letaknya yang strategis Indonesia dapat melakukan hubungan baik politik maupun ekonomi dengan 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Selain itu Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut untuk mensejahterakan rakyatnya.<sup>56</sup>

Potensi negara yang memiliki letak geografis dan geopolitik strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran dan komunikasi internasional yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Australia dan negara-negara di sekitar Asia. Menjadi keutungan besar bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, minyak, maupun keindahan wisata lautnya untuk modal utama menjadi negara maju. Indonesia juga memiliki 10 komoditi unggulan yang dapat di produksi dan dipasarkan ke kancan internasional. Komoditi utama tersebut ialah minyak kelapa sawit, elektronik, produk hasil hutan, karet dan produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang dan kopi.

Kondisi ekonomi Indonesia hingga saat ini masih banyak menghadapi tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Masalah struktural pada perekonomian global, yang penyelesaiannya memerlukan waktu dan tentunya perlu diantisipasi sedini mungkin.

---

<sup>56</sup>Prameswari Surya Anggraeni, "PolitikLuarNegeri Indonesia Poros Maritim Dunia di Era Pemerintahan Joko Widodo", (eJournalllmuHubunganInternasional, 2016, 4 (2) 347-358 ISSN 2477-2623) , ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id

Kemampuan adaptasi ekonomi domestik pun harus semakin dioptimalkan agar tidak tersingkir dari kondisi global yang tidak kondusif.

Kondisi ekonomi domestik Indonesia sampai dengan Triwulan III-2016 masih bertumbuh 5,02 persen, meningkat dibandingkan dengan capaian 2015. Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 akan berada di sekitar 5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal di penghujung tahun 2015, yaitu sekitar 5,2-5,6 persen, sebagai dampak ekonomi global yang ternyata pertumbuhannya lebih rendah dari perkiraan semula. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelenturan ekonomi domestik banyak dipengaruhi oleh permintaan dari sisi domestik. Realisasi tingkat permintaan domestik tersebut masih dalam kecenderungan meningkat, sehingga dapat meminimalkan dampak menurunnya kinerja sektor eksternal.<sup>57</sup>

Pada sektor industri, pencapaian target indikator laju pertumbuhan industri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2011 sebesar 111,97 persen mengalami penurunan sampai tahun 2014 menjadi 82,50 persen. Namun pada tahun 2015, pencapaian target mengalami peningkatan menjadi sebesar 84 persen. Begitu juga dengan angka realisasi pertumbuhan industri, yang berangsur-angsur turun dari sebesar 6,74 persen pada tahun 2011, menjadi sebesar 6,40 persen pada tahun 2012 dan kembali turun

---

<sup>57</sup> Mandala Harefa, "Penguatan ekonomi domestik", (Majalah info singkat ekonomi dan kebijakan publik, Vol. VIII, No. 23/1/P3DI/Desember/2016), hlm 14.

pertumbuhannya hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 turun lagi hanya tumbuh sebesar 5,61 persen. Pada tahun 2015, realisasi pertumbuhan industri ini juga mengalami penurunan kembali sebesar 5,04 persen. Nilai kontribusi industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas yang selalu terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional.<sup>58</sup> (tabel 4.1)

**Tabel 4.1 Peran Sektor Industri Terhadap PDB Nasional (Persen)**

No	Lapangan usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.51	13.37	13.37	13.34	13,52
2	pertambangan dan Penggalian	11.81	11.61	11.61	9.87	7,62
3	Industri Pengolahan	21.76	21.45	21.03	21.01	20,84
	a. Industri Migas	3.63	3.46	3.46	3.11	2,76
	<b>b. Industri Non Migas</b>	<b>18.13</b>	<b>17.99</b>	<b>17.99</b>	<b>17.89</b>	<b>18,18</b>
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.17	1.11	1.11	1.08	1,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0.08	0.08	0.08	0.07	0,07
6	Konstruksi	9.09	9.35	9.51	9.86	10,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran	13.61	13.21	13.27	13.44	13,29
8	Transportasi dan Pergudangan	3.53	3.63	3.87	4.42	5,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.86	2.93	3.04	3.04	2,96
10	Informasi dan Pergudangan	3.6	3.61	3.58	3.5	3,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.46	3.72	3.87	3.87	4,03
12	Real Estate	2.79	2.76	2.77	2.97	2,86
13	Jasa Perusahaan	1.46	1.48	1.52	1.57	1,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.89	3.95	3.9	3.38	3,91
15	Jasa Pendidikan	2.97	3.14	3.25	3.24	3,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.98	1	1.01	1.03	1,07
17	Jasa Lainnya	1.44	1.42	1.47	1.55	1,65
		100	100	100	100	100

Sumber: BPS diolah oleh Kementerian Perindustrian

<sup>58</sup> Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA, "Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015", hlm 25.

Pada tahun 2015 sumbangan terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, kemudian Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalan; dan Transportasi dan Pergudangan. Sementara kontribusi lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen. Kenaikan permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi baik domestik maupun internasional, telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDB. Pada tahun 2011 Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 21,76 persen; menurun menjadi 21,45 persen pada tahun 2012; 21,03 persen pada tahun 2013; 21,01 persen pada tahun 2014; dan 20,84 persen pada tahun 2015.<sup>59</sup> (Tabel 4.1)

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya penurunan harga komoditas pada tahun 2015 mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia. Dengan komposisi ekspor Indonesia yang masih didominasi SDA, penurunan harga komoditas global mendorong penurunan *terms of trade* (ToT) cukup dalam. Turunnya harga komoditas mendorong kontraksi ekspor terutama yang berbasis komoditas seperti pertambangan, dengan penurunan paling tajam terjadi pada batubara. Meski demikian, kebijakan pemberian perpanjangan ijin ekspor konsentrat mineral (tembaga) sesuai dengan kemajuan pembangunan *smelter* dapat menahan penurunan ekspor lebih dalam. Sementara itu,

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik, "Pendapat Nasional Indonesia 2011-2015", (ISSN: 0854-6959 katalog BPS 930100), hlm 105.

ekspor manufaktur juga belum menunjukkan peningkatan ditengah pelemahan nilai tukar rupiah. Belum kuatnya ekspor manufaktur tidak terlepas dari rendahnya permintaan global, serta masih cukup besarnya kandungan impor dalam ekspor. Pelemahan ekspor terlihat dari penurunan ekspor ke salah satu mitra dagang utama, yakni Tiongkok, yang lebih rendah hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama bersumber dari kontraksi ekspor berbasis komoditas yang dominan dalam struktur ekspor ke Tiongkok. Namun demikian, kinerja positif ditunjukkan oleh ekspor otomotif Indonesia yang tetap menunjukkan pertumbuhan cukup baik dalam 2014 dan 2015 (Tabel 4.1).<sup>60</sup>

**Tabel 4.2 Perkembangan Ekspor Nonmigas**

Komponen PDB	Jan-Des (Miliar Dolar AS)		Pertumbuhan (Persen, ytd)		Share 2014	Share 2015
	2014	2015	2014	2015		
<i>Curde Palm Oil</i>	20,0	17,8	8,6	-10,9	13,6	13,5
Batubara	20,8	16	-14,5	-23,4	14,2	12,1
Pakaian	7,7	7,6	-0,5	-1,3	5,2	5,7
Peralatan Elektronik	6,1	5,6	-1,5	-9,3	4,2	4,2
Tekstil	4,7	4,4	3,1	-7,3	3,3	3,4
Kendaraan	5,2	5,4	14,5	3,1	3,6	4,1
Karet Mentah	4,8	3,7	-30,9	-21,9	3,3	2,9
Biji Besi dan Baja	4,1	3,1	-4	-23	2,8	2,4
Suku Cadang	2,3	2,0	1,8	-13,3	1,5	1,5
Furnitur	1,8	1,7	2,4	-4	1,2	1,3
Plastik dan Sejenisnya	1,2	0,9	10,4	-23,1	0,8	0,7
Lainnya	68,0	63,9	-1,3	-5,3	-52,8	-50,7
TOTAL EKSPOR NON MIGAS	146,5	131,9	0,0	-8,1	1,0	1,0

Sumber: LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2015, Bank Indonesia bagian II

<sup>60</sup>Ibid hlm 44.

Di sisi domestik, kondisi Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Di sektor pangan, jumlah dan kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan teknologi yang mencukupi. Di sisi lain, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras akibat minimnya diversifikasi pangan.

Tantangan struktural kedua adalah tantangan memperkuat daya saing industri. *Terkait daya saing industri*, sektor industri di Indonesia masih berbasis komoditas ekstraktif dan yang bernilai tambah rendah. Di samping itu, keunggulan komparatif Indonesia terus mengalami penurunan terutama pada sektor dengan muatan teknologi menengah dan tinggi. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memperkuat daya saing investasi guna menjadi basis produksi dalam memasok dalam rantai nilai global. Tantangan struktural ketiga adalah tantangan untuk memperluas tingkat partisipasi ekonomi masyarakat dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi. Tiga tantangan permasalahan struktural domestik tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan modal dasar pembangunan khususnya yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia,

iklim usaha, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dari sisi kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan tenaga kerja yang mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah belum compatible dengan upaya penguatan struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi. Di sisi iptek, belum optimalnya dukungan iptek dalam meningkatkan daya saing sektor produksi dan jasa merupakan permasalahan yang harus terus dicermati.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2015, (Bagian IV, Bank Indonesia), hlm 253



## A.2 Peluang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui TPP

Tabel 4.3 SWOT

		Indonesia	
		Strenght	Weakness
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya memiliki berbagai kekayaan alam</li> <li>- Meliki 10 komoditi unggulan yaitu tekstil dan produk tekstil, minyak kelapa sawit (CPO), elektronik, Produk hasil hutan, karet dan produk karet, otomotif, alas kaki, kakau, udang, dan kopi.</li> <li>- Nilai kontribusi industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas yang selalu terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Indonesia masih rendah</li> <li>- Daya saing Indoesia masih rendah</li> <li>- Barang produksi Indonesia belum memiliki kompeten secara baik</li> <li>- Masyarakat yang konsumtif</li> </ul>
TPP	<p><b>Threat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk-produk luar akan membanjiri pasar Indonesia</li> <li>- Kesamaan produk yang di produksi oleh negara lain yang tergabung di TPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi yang dapat diolah menjadi suatu barang jadi yang memiliki harga jual.</li> <li>- Menciptakan inovasi baru untuk suatu barang produksi yang memiliki kesaamaan dengan negara anggota TPP agar Indonesia mampu bersaing dengan negara yang tergabung dalam TPP</li> </ul>	Menyediakan bantuan Mesin atau Peralatan untuk mendukung pengembangan kemampuan SDM industri dengan mendukung pelatihan dan meningkatkan produktivitas industri melalui percepatan produksi, Peningkatan kemampuan soft skill SDM industri
	<p><b>Oppoturnity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penghapusan tarif dan non tarif hambatan pada pertanian, tekstil, pakaian, dan otomotif.</li> <li>- TPP menghilangkan semua tariff perdagangan atas produksi tekstil dalam beberapa periode</li> <li>- Membuka pasar ekpor baru untuk Indonesia yang nilainya masih kecil</li> <li>- Dapat membuka akses perdangan secara mudah dengan Amerika Seikat, jepang, amerika latin</li> </ul>	Mempromosikan produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia harus mampu berperan melindungi pengusaha lokal dan berusaha membawa pengusaha lokal mampu bersaing di pasar Internasional.	Meningkatkan produk tekstil untuk merebut peluang pasar yang dibuka oleh TPP

Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jika terwujud TPP ini akan menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar yang dimana Amerika Serikat ikut berpartisipasi di dalam perjanjian tersebut. Proses negoisasi perjanjian TPP ini terdapat lebih dari 20 bab yang akan dibahas, mitra TPP mengharapkan perjanjian ini akan menjadi “comprehensive and high-standard,” karena mereka berusaha untuk menghapus tarif dan hambatan nontariff untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, dan untuk membangun atau memperluas aturan berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual, investasi asing langsung, dan isu-isu terkait perdagangan lainnya. Anggota TPP juga berusaha untuk menciptakan “kesepakatan abad ke 21” yang membahas isu-isu baru dari lintas sektoral yang disajikan oleh ekonomi yang semakin mengglobal.<sup>62</sup>

Melalui TPP, negara-negara anggota berusaha untuk liberalisasi perdagangan dan investasi dan membangun aturan baru dan disiplin di wilayah luar apa yang ada di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian TPP ini digambarkan sebagai perjanjian yang akan terbuka untuk anggota di masa depan dan bisa menjadi kendaraan untuk memajukan Asia-Pasifik menjadi kawasan perdagangan bebas yang lebih luas. Ini merupakan respon kebijakan Amerika Serikat terhadap hubungan

---

<sup>62</sup> Fergusson, I.F., Vaughn B., “*The Trans-Pacific Partnership Agreement*”. (Congressional Research Service, 12 Desember 2011)

ekonomi dan strategis yang meningkat pesat di antara negara-negara Asia-Pasifik dan telah menjadi pusat ekonomi ke wilayah tersebut.<sup>63</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang dibujuk oleh Amerika Serikat untuk bergabung dalam forum TPP tersebut. Amerika Serikat berkomitmen penuh dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam hal stabilitas keamanan. Amerika Serikat memandang bahwa negara-negara khususnya di Asia Pasifik sebagai mitra kerja penting. Hal inilah yang mendasari Amerika Serikat memimpin negosiasi perluasan keanggotaan TPP. Meskipun TPP masih dalam proses negosiasi namun Amerika Serikat telah memperlihatkan komitmennya terhadap perluasan TPP, dengan melakukan berbagai upaya atau usaha untuk memperluas TPP terutama pada periode 2011-2013.

Mengawali 1 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat (AS) memenuhi undangan Presiden AS Barrack Obama. Salah satu isu yang mengemuka dalam kunjungan yang berlangsung pada 25-28 Oktober 2015 tersebut adalah keinginan Indonesia bergabung ke *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Keinginan untuk bergabung dengan TPP disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Presiden Obama saat pertemuan di Gedung Putih. Suatu pernyataan yang tampaknya dinantikan AS, setelah

---

<sup>63</sup> Fergusson, I.F., Vaughn B., "*The Trans-Pacific Partnership Agreement*". (Congressional Research Service, 9 febuari 2016)

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memilih untuk tidak bergabung dengan TPP.

Ketertarikan Indonesia ingin bergabung ke dalam *Trans-Pasific Partnership* dikarenakan ada beberapa pertimbangan yaitu ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang terbuka. Dengan penduduk yang begitu banyak, Indonesia hadir sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia dipercaya menjadi anggota kelompok 20 (G-20) berkat produk domestik bruto senilai US\$ 1 triliun.<sup>64</sup> Dengan bergabungnya kedalam TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Dengan 12 negara Asia Pasifik, Kemitraan *Trans-Pasific Partnership* (TPP) menghasilkan suatu kawasan perdagangan yang mencakup sepertiga dari total perdagangan dunia dan menghasilkan hampir 40 persen total Produk Domestik Bruto dunia. Perjanjian TPP ini disebut model bagi perjanjian perdagangan abad ke-21 karena disebabkan lingkup pembahasannya yang komprehensif dan mendalam. Liberalisasi perdagangan merupakan suatu prasyarat yang harus ada. Negara anggota TPP diharapkan dapat menghilangkan bea masuk ketika TPP mulai berlaku, kecuali untuk beberapa produk sensitif.

---

<sup>64</sup>Humphrey Wangke, "Kesiapan Indonesia Menjadi anggota *Trans-Pasific Partnership*", (Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VII, No. 21/1/P3DI/November/2015) hlm 5-6, berkas.dpr.go.id

Manfaat liberalisasi dalam TPP juga akan dirasakan dunia usaha. Secara keseluruhan negara-negara TPP mengambil porsi sekitar 44% dari keseluruhan ekspor Indonesia, apalagi mengingat beberapa produk yang terkena bea masuk tinggi, seperti beberapa produk alas kaki masih terkena bea masuk 30% di AS. Bea masuk preferensial TPP yang sangat rendah akan meningkatkan peluang produk Indonesia untuk dapat memasuki pasar negara tersebut. Selain itu, produsen Indonesia akan mendapatkan kemudahan untuk tergabung dalam jaringan produksi internasional dari perusahaan yang berasal dari negara TPP lainnya. Bahan baku dan komponen yang diperlukan dalam proses produksi juga akan bisa didapatkan dengan lebih mudah dan murah.<sup>65</sup>

Sehingga dengan bergabungnya Indonesia ke dalam TPP, Indonesia ingin meningkatkan perekonomiannya. Namun dengan begitu Indonesia harus mampu menyiapkan strategi agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota dalam TPP. Mengingat kembali jika Indonesia tidak memperhatikan perjanjian TPP ini secara detail akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

Ketika Industri manufaktur di Indonesia belum siap, dengan adanya pembukaan pasar bebas seperti TPP akan mengundang produk-produk luar untuk membanjiri pasar di Indonesia. Keadaan tersebut akan membawa Indonesia ke posisi yang lebih sulit. Sehingga Indonesia harus meningkatkan produksi yang dapat di olah menjadi suatu barang yang

---

<sup>65</sup> Yose Rizal Damuri, "*Indonesia dan Trans-Pasific Partnership*", (Kompas, 18 November 2015)

memiliki harga jual beli, contohnya seperti karet dapat diproduksi menjadi ban yang memiliki *standart Internasional* agar ban tersebut harganya dapat jauh lebih tinggi untuk dipasarkan ke kancah internasional dibandingkan dengan karet yang masih mentah.

Strategi pemasaran juga diperlukan agar masyarakat lebih memilih produk dalam negeri daripada produk luar negeri dalam strategi ini pemerintah juga sangat diperlukan. Pemerintah harus mampu berperan melindungi pengusaha lokal dan berusaha membawa pengusaha lokal mampu bersaing dipasar internasional seperti TPP. Dengan begitu pemerintah dapat melindungi negara dari produk-produk luar yang akan menguasai pasar domestik Indonesia.

Selanjutnya, kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Untuk meningkatkan produktivitas SDM industri Indonesia ialah menyediakan bantuan Mesin/Peralatan guna mendukung pengembangan kemampuan SDM industri dengan mendukung pelatihan ini dan meningkatkan produktivitas industri melalui percepatan produksi, Peningkatan kemampuan soft skill SDM industri dan pembangunan Center of Excellence Industri sebagai pusat pengembangan industri.

Menurut Achamd Shauki seorang ekonom dari Australia Indonesia *Partnership for Economic Governance* (AIPEG), mengatakan bahwa peluang ekspor baru akan terbuka seiring dengan perluasan dan diversifikasi tujuan ekspor Indonesia. Peluang ekspor baru itu akan

dialami secara keseluruhan oleh Indonesia. Industri tekstil dan alas kaki merupakan salah satu industri yang merasakan manfaat paling besar dari keikutsertaan Indonesia ke dalam *Trans-Pacific Partnership*.

Setidaknya dari 12 negara yang tergabung dalam TPP, terdapat lima negara anggota yang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia, yakni Jepang, Amerika Serikat (AS), Singapura, Malaysia, dan Australia. Perdagangan antara Indonesia dan AS pun diyakini akan meningkat pesat. Sementara itu, dari segi produsen, keikutsertaan dalam TPP juga dipandang akan menekan tarif yang dikenakan terhadap produk ekspor asal Indonesia. Dengan demikian, produk ekspor Tanah Air diharapkan bisa lebih kompetitif karena harganya menjadi lebih kompetitif dan mampu bersaing dalam perdagangan antara negara TPP.

Olah data dari AIPEG menunjukkan tarif masuk yang dikenakan oleh negara di Benua Amerika terhadap produk asal Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tarif serupa yang dikenakan untuk produksi asal negara Asean lainnya. Sehingga menurut Achmad, produk asal Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produk serupa asal negara Asean lainnya. Namun dengan tarifnya yang lebih tinggi produk Indonesia jadi kurang kompetitif karena Indonesia membayar tarif lebih tinggi.

Secara lebih terperinci, rerata tarif yang dikenakan oleh negara di wilayah Amerika terhadap produk Indonesia tercatat mencapai 5%-7%. Di sisi lain, rerata tarif yang dikenakan oleh seluruh rekan dagang Indonesia

terhadap produk asal Tanah Air hanya berkisar 2%. Sementara itu dilihat dari implikasi TPP terhadap impor, hasil kajian AIPEG mengungkapkan impor akan melompat lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor, yakni senilai US\$3,8 miliar. Impor diyakini akan didominasi oleh impor bahan baku dan penolong serta barang modal.

Dalam perjanjian TPP Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan Indonesia dengan Amerika Serikat yang semula US\$ 9296 juta menjadi US\$ 10.749 juta, surplus neraca perdagangan akan dirasakan mitra Indonesia dengan Meksiko yaitu US\$ 768 menjadi US\$ 933 juta, kemitraan Indonesia dengan Peru juga mengalami surplus neraca perdagangan dari semula US\$ 154 juta menjadi US\$ 178 juta, sementara surplus akan menyempit dengan Jepang dari semula US\$ 7710 menjadi US\$ 5350. Adapun, dengan Singapura deficit akan menyempit dari semula US\$ -727 juta menjadi -7196 juta US\$, kemitraan Indonesia dengan Malaysia, Kanada, dan Vietnam, defisit perdagangan juga akan diperkirakan menyempit (Tabel 4.4). Sehingga dengan Indonesia mampu menciptakan ekspor baru senilai US\$2,9 miliar khusus pasar barang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ardanaraswari, "TPP Ciptakan Peluang Ekspor US\$2,9 Miliar", (Bisnis Indonesia, 19 Mei 2016)



Disisilain, AIPEG juga mengemukakan resiko yang mungkin dihadapi Indonesia jika tidak bergabung ke TPP yaitu pengalihan perdagangan dari Indonesia ke negara lain yang tergabung dalam TPP. Nilai pengalihan itu ditaksirkan sekitar US\$306 juta. Adapun negara yang dipandang paling diuntungkan jika Indonesia memutuskan berada diluar TPP adalah Vietnam. Pasalnya, negara ini memiliki keunggulan komparatif dan produk ekspor yang relatif sama dengan Indonesia. Apalagi negara tersebut juga menunjukkan lonjakan performa ekspor yang signifikan dalam beberapa taun terakhir.<sup>67</sup>

**Tabel 4.4 Perkembangan dan Proyeksi Neraca Perdagangan Indonesia dalam *Trans-Pacific Partnership*.**

Pasar TPP	Perubahan (US\$ juta)*		Neraca Perdagangan (US\$ juta)	
	Ekspor	Impor	Pra-TPP	Pasca TPP
AS	2.331	878	9296	10.749
Jepang	128	2.488	7.710	5.350
Meksiko	189	25	768	933
Peru	24	1	154	178
Chili	25	8	-58	-41
Selandia Baru	11	53	-209	-251
Vietnam	26	-12	-234	-197
Brunei	0	0	-541	-541
Kanada	154	70	-761	-677
Australia	8	379	-870	-1.24
Malaysia	28	-34	-4.867	-4.805
Singapura	-	-77	-7.273	-7196
Total	2.925	3.778	3.115	2.261

Sumber : AIPEG, 2016. Diolah oleh Koran Bisnis Indonesia, 19 Mei 2016

<sup>67</sup> Loc.cit.

## **B. Kenaikan Posisi Kelas Indonesia**

### **B.1 Posisi Kelas Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya memiliki berbagai kekayaan alam melimpah. Seperti sumber minyak mentah, hasil tambang seperti emas, timah, tembaga, serta sumber-sumber hayati lain seperti hutan. Hal tersebut berpotensi menghasilkan kekayaan alam yang merupakan modal utama bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Namun, faktanya berbagai potensi tersebut tetap menempatkan Indonesia sebagai negara semi pinggiran.

Indonesia sebagai negara semi pinggiran merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (Association of South East Asian Nation) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangannya ekonominya belum begitu mapan. Bahkan para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan banyak dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* memiliki kinerja perekonomian yang mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle* (keajaiban), tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan mengalami kesulitan

dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.<sup>68</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi saat itu telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks, terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Saat ini Indonesia berada dalam transisi, yang belum terbayangkan berapa lama masa transisi itu akan berlangsung. Meskipun semula krisis ini hanya merupakan *contagion effect* dari depresiasi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS pada tahun 1997, tetapi karena fundamental perekonomian Indonesia yang rapuh, maka dampak krisis ini terkena sangat dahsyat, sementara proses *economic recovery*-nya berjalan lamban. Prestasi perekonomian Indonesia yang semula cukup baik, berubah menjadi negatif, banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah semu dengan fundamental yang tidak kuat. Di samping itu, para pengamat juga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang tangguh, tetapi karena didukung oleh investasi asing, bahkan berjangka pendek sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Pembangunan nasional juga dibangun dengan utang luar negeri yang bersifat pasif, sehingga justru memberatkan kondisi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Abdul Manan, "Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia", (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 1.

<sup>69</sup> Ibid hlm. 1-2

Timbulnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja tinggi serta merosotnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat merupakan problem sosial yang kompleks akibat dari kondisi perekonomian Indonesia yang rapuh. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga terjadi ketidakpastian akses pasar ekonomi dunia. Kondisi perekonomian dunia seperti ini, membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara selaku pelaku ekonomi di dunia internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.

Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia yaitu menganjurkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara di Asia-Pasifik. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara di Asia-Pasifik yang penuh persaingan. Para ahli ekonomi Indonesia juga ada yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Solusi untuk masalah ini, selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi

pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu, desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesak untuk dilaksanakan.<sup>70</sup>

Salah satu model pembangunan ekonomi di era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal di suatu negara. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan amat pesat, sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan mensejajarkan diri dengan pasar modal lain di dunia. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal secara akomodatif sudah selayaknya mengacu pada prinsip-prinsip peraturan dan praktik yang berlaku di dunia pasar modal internasional.<sup>71</sup>

Globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini tidak dapat terlepas dari pengaruh paham neoliberal. Perdagangan bebas barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan kebebasan berinvestasi merupakan tiga tumpuan fundamental paham neoliberal. Menurut paham tersebut, segala investasi pemerintah di dunia ekonomi semenjak tahun 1930-an hanya mengakibatkan industri-industri menjadi boros dan tidak efisien.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid hlm 2-3

<sup>71</sup> M. Irsan Nasarudin., dkk, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*", (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. vii

<sup>72</sup> Chris Herman, "*Anti Kapitalisme*", (Jakarta : Teplok Press, 2003), hlm 3

Ide-ide neoliberal menjadi pondasi pada kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia dan program-program “reformasi ekonomi: yang diajukan oleh politikus dan para ahli ekonomi.<sup>73</sup> Deregulasi, privatisasi dan liberalisasi merupakan jargon yang diusung oleh paham neoliberal. Rumusan dasar inilah yang merasuk ke dalam lembaga-lembaga keuangan internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank, serta terefleksi dalam kebijakan-kebijakan mereka, yang kemudian kesepakatan ini dikenal dengan *Washington Konsensus*.<sup>74</sup> Lembaga-lembaga keuangan ini pada awalnya sangat digemari oleh negara-negara dunia ketiga karena lembaga ini dapat membantu modal pembangunan negara dunia lewat hutang dan bantuan-bantuan asing. Melalui bantuan modal inilah lembaga-lembaga ini mendikte kebijakan ekonomi negara dunia ketiga. Faktanya lembaga-lembaga tersebut semakin memiskinkan negara dunia ketiga dan menjebak negara dunia ketiga dalam ketergantungan. Sebenarnya lembaga-lembaga tersebut hanya menguntungkan negara-negara kaya yang ada di belakang lembaga-lembaga tersebut.

Kebijakan lembaga keuangan internasional tersebut selalu mengarah kepada privatisasi dan liberalisasi lewat mesin mereka: pinjaman. Setiap pinjaman yang di berikan kepada negara-negara debitur selalu disertai prasyarat yang lebih dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programme/SAP*). Fungsi utama dari

---

<sup>73</sup> ibid

<sup>74</sup> Jurnal wacana 12, tahun III : “*Lingkungan Versus Kapitalisme Global*”, (Yogyakarta: INSIST Press), hlm. 12.

SAP ialah merombak sistem lama disuatu negara agar sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang diusung oleh paham neoliberal.

Indonesia merupakan salah satu negara semi pinggiran patuh terhadap SAP. Masuknya IMF sebagai donatur pemberi pinjaman menyebabkan campur tangan lembaga keuangan internasional terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Negara sudah tidak mempunyai kemandirian akibat perannya yang mulai melemah dan diganti dengan menguatnya kebijakan pasar. Dalam pembangunan ekonomi dunia, Imanuel Wallerstein membagi dunia kapitalis menjadi tiga kategori yaitu negara inti (core), negara semi pinggiran (semi periperi) dan negara pinggiran (periperi). Perbedaan inti dari ketiga kategori adalah kekuatan ekonomi, politik dan militer dari masing-masing kategori negara. Pengukuran dari perbedaan ekonomi negara core, semi pinggiran dan negara pinggiran di ukur dengan GNP perkapita sementara kekuatan politik di ukur sebagai kekuatan militer<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Edward L. Kick 1987. World-System Structure, National Development, and the Prospects for a Socialist World Order. In Terry Boswell, and Albert Bergesen (eds.), *America's Changing Role in the world-system*, pp. 127-155. New York: Praeger.

Dalam *Journal Of World-Systems Research* V.III, N.3, Burns et al (1997) menyajikan beberapa daftar negara pada setiap kategori yaitu

**Tabel (4.5) Negara dalam Kategori Core, Semi Phery-phery, Phery-phery**

Core	Semi Phery-Phery	Phery-phery
Amerika Serikat	Algeria	Angola
Jepang	Chilie	Bangladesh
Kanada	Colombia	Kongo
Denmark	India	Nepal
Belanda	Indonesia	Ethiophia
Perancis	Iran	Madagaskar

Sumber: *Journal Of World-Systems Research*

Melihat dari tabel tersebut Indonesia merupakan negara yang masuk kedalam kategori negara semi phery-phery. Dalam laporan Bank dunia tentang kriteria negara pusat, semi pinggiran dan pinggiran, Bank dunia menggunakan perbandingan GNP/PDB sebagai indikator pembanding. Menurut Bank Dunia negara yang mempunyai GNP 976 US\$ merupakan negara berpenghasilan rendah, negara yang mempunyai GNP 976 US\$ ke 3.855 US\$ merupakan negara berpenghasilan menengah rendah, negara yang mempunyai GNP 3.856 ke 11.906 US\$ merupakan negara berpenghasilan tinggi.<sup>76</sup> Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015 tercatat sebesar Rp45,2 juta (US\$3.377,1).<sup>77</sup> Sehingga dengan PDB Indonesia di tahun 2015 membuat Indonesia tergolong negara semi pinggiran.

<sup>76</sup> <http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/chapter2.html>

<sup>77</sup> LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2015, Bank Indonesia abian IV ,hal. 43

Tersedia d [http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/6\\_Bagian\\_IV.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/6_Bagian_IV.pdf) [Diakses pada 14 Febuari 2017 pukul 15.25]



Berbagai potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seperti minyak bumi, hasil tambang, lumbung pertanian, hutan luas yang menyimpan berbagai kekayaan hayati merupakan modal yang lebih untuk membuat Indonesia menjadi negara kaya. Peran Indonesia dikancah Internasioal penting. Indonesia juga berperan aktif dalam perjanjian perdagangan bebas. Namun melihat fakta yang ada, Indonesia masih tergolong sebagai negara semi pinggiran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi.

Disisi lain bahwa neoliberalisme memberikan kesempatan kepada negara pinggiran untuk mengalami kenaikan kelas menuju negara semi pinggiran atau bahkan menajdi negara pusat. Seperti Korea Selatan merupakan salah satu contoh negara berkembang yang mampu mngalami “kenaikan kelas” seperti yang dimaksudkan Imanuel Wallerstein. Awalnya Korea Selatan tergantung pada hutang tetapi sekarang mempunyai pertumbuhan ekonomi terbesar ke 12 di seluruh dunia. Setelah perang dunia II, PDB Korea Selatan sama dengan negara miskin lainnya di Afrika dan Asia, tetapi saat ini PDB perkapitanya kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan pada tahun 2003 (\$855,3 miliar). Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% bidang industri dan kontruksi menjadi faktor utama.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Background Note: North Korea". U.S. State Department, tersedia <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm> diakses pada 21 febuari 2016

## **B.2 Peluang “Kenaikan Kelas” Indonesia Melalui TPP**

Pemikir asal Amerika Serikat, Immanuel Wallerstein menulis konsep tentang “kenaikan kelas” yang mana negara pinggiran dapat menjadi negara semi pinggiran atau bahkan menjadi negara maju (negara pusat). Menurut Wallerstein perubahan sosial pada dasarnya terletak pada bagaimana perjuangan antara negara pinggiran dan semi pinggiran di masa datang. Oleh karena itu persoalannya terletak pada bagaimana negara pinggiran melakukan strategi pembangunan alternatif yang memenangkan dan memanfaatkan kesempatan, mengundang investasi dan strategi berdikari.<sup>79</sup>

Perubahan juga terjadi dari semi pinggiran ke negara sentral. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunkan kesempatan pasar dan memperluas jaringan pasar. Usaha ini dilakukan dengan bebragai cara, mulai dari aneksasi wilayah lain, menaikkan harga impor, dengan menaikkan kuota dan tarif pada barang impor ataupun dengan melakukan subsidi, menekan upah buruh, menaikkan daya beli riil masyarakat, serta memanipulasi selera konsumen dengan promosi dan bahkan ideologi<sup>80</sup>

Melalui pemikiran Wallerstein tersebut, keinginan Indonesia untuk bergabung menajadi anggota Trans-Pasific Partnership karena Indonesia ingin memperluas jaringan pasar agar perjanjian perdagangan tersebut

---

<sup>79</sup> Mansour Fakih, *“Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi”*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 140

<sup>80</sup> Ibid. hlm. 141

dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menaikkan posisi kelasnya dari negara semi pinggiran menjadi negara pusat. Mengingat kembali sebagian anggota TPP merupakan negara maju. Sehingga Indonesia dapat memposisikan diri agar dapat bersaing dengan negara maju yang tergabung dalam TPP.

Sudut pandang dalam *World system theory* dari Immanuel Wallerstein mengatakan bahwa negara dunia ketiga atau negara berkembang dapat naik kelas atau naik kasta dengan cara memanfaatkan celah kapitalisme dunia, karena menurut Wallerstein di dalam sistem kapitalisme dunia ada pembagian kerja yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang. Indonesia memiliki peluang yang cukup baik di dalam TPP tersebut asalkan Indonesia dapat memanfaatkan celah kapitalisme dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah. Seperti sumber minyak mentah, hasil tambang seperti emas, timah, tembaga, serta sumber-sumber hayati lain seperti hutan. Hal tersebut berpotensi menghasilkan kekayaan alam yang merupakan modal utama bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia juga pernah disebut sebagai “macan Asia” karena pertumbuhan ekonominya lebih dari tujuh persen per tahun pada 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi saat

ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dahulu di belakang Indonesia, sekarang memperlihatkan kinerja yang lebih baik.<sup>81</sup> .

Indonesia menjadi "macan Asia" ketika industri manufaktur berkembang pesat, terutama tekstil dan alas kaki. Kondisi seperti ini yang ingin kembali dicapai Indonesia. Karena itu, pemerintah sedang memperbaiki regulasi untuk mendorong sektor manufaktur sebagaimana tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sejak September 2015. Beberapa paket kebijakan itu dimaksudkan untuk menangani ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi itu, maka Indonesia harus memajukan industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor barang konsumsi sebab kondisi global saat ini memberi tekanan bagi eksportir komoditas. Sehingga Indonesia harus mencari pasar baru untuk ekspor komoditas.<sup>82</sup> Negara anggota TPP merupakan sasaran pasar baru bagi Indonesia terutama Amerika Serikat.

Dalam mencapai kepentingannya dalam sektor kesuksesan ekspor impor, Indonesia telah melalui berbagai percobaan diantaranya adalah berkomitmen melalui berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral. Perjalanan ini diawali dengan keikutsertaan Indonesia terhadap ASEAN.

---

<sup>81</sup> Humphrey Wangke, "Kesiapan Indonesia Menjadi anggota Trans-Pasific Partnership", (Info Singkat Hubungan Internasional 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, hlm .5-6, berkas.dpr.go.id [Diakses pada 16 febuari 2017 pukul 15.09]

<sup>82</sup> Loc.cit.

Setelah cukup lama, Indonesia memutuskan untuk melebarkan jaringan perdagangan multilateral melalui APEC, kemudian pada bulan oktober 2015 lalu presiden Jokowi menyatakan Indonesia ingin bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas *Trans-Pacific Partnership*. Berikut merupakan komparasi perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN, APEC, dan TPP. (Tabel 4.6)

Melihat (Tabel 4.6) jelas TPP memberikan peluang kenaikan kelas yang signifikan dibandingkan dengan perjanjian regionalisme yang lain. Dalam perjanjian ASEAN ekspor Indonesia mengalami penurunan yang semula US\$ 920 ribu menjadi US\$ 875 ribu, perjanjian APEC total perdagangan Indonesia mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat pada tahun 2011 yang kemudian mengisi 75% dari total perdangan Indonesia. Sementara perjanjian TPP surplus perdagangan akan bertambah dengan AS, Meksiko, dan Peru, sementara surplus akan menyempit dengan Jepang. Adapun, dengan singapura, Malaysia, Kanada, dan Vitenam, defisit perdagangan akan diperkirakan menyempit, sehingga Indonesia mampu menciptakan Indonesia mampu menciptakan ekspor baru senilai US\$2,9 miliar khusus pasar barang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ardanaraswari, "TPP Ciptakan Peluang Ekpor US\$2,9 Miliar", (Bisnis Indonesia, 19 Mei 2016)

**Tabel 4.6 Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN, APEC, TPP**

Kategori	ASEAN	APEC	TPP
Keanggotaan	10 negara :Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.	21 negara : Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, epany, Korea, Malaysia, Meksiko, PNG, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, AS, Vietnam.	12 negara, yaitu Brunei, Singapura, Cile, Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, Peru, Malaysia, Kanada, Meksiko, dan Jepang
Ruang Lingkup Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan pasar tunggal dan basis produksi.</li> <li>- Kawasan ekonomi yang kompetitif.</li> <li>- pembangunan ekonomi yang merata.</li> <li>- Terintegrasinya perekonomian global. (*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki inisiatif liberalisasi perdagangan APEC EGS Work Program</li> <li>- Penurunan tarif yang tidak akan lebih dari 5 persen pada tahun 2015 seiring dengan diberlakukannya daftar kategori produk EGs (**)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghapusan tarif dan hambatan non tariff untuk perdagangan barang,jasa, dan pertanian. Membangun atau memperluas aturan berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual (HKI), investasi asing langsung, dan isu-isu terkait perdagangan.</li> <li>- mencakup tariff lebih dari 11.000 kategori komoditas untuk masing-masing negara anggota.</li> <li>- Total PDB sebesar US\$17 triliun</li> <li>- Total perdagangan barang dan jasa diantara negara anggota TPP sebesar US\$ 7 triliun, dan 60 persen di antaranya merupakan sumbangan dari AS. (***)</li> </ul>
Volume Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspor Indonesia sebelum adanya MEA : US\$ 920 ribu</li> <li>- Ekspor Indonesia setelah MEA : US\$ 875 ribu</li> <li>- Impor Indonesia sebelum MEA : US\$ 863 impor Indonesia setelah MEA adalah US\$ 815 ribu.(***)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total perdagangan ekspor dan impor Indonesia sebelum bergabung ialah 29.9 Milyar US\$</li> <li>- Total ekspor Indonesia setelah bergabung sebesar USD 124,68 miliar, impor Indonesia sebesar USD 134,27 miliar, atau defisit sebesar USD 9,58 miliar pada tahun 2014</li> <li>- Pada tahun 2015 ekspor Indonesia mengalami penurunan menjadi USD 103 milliar (***)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan ekspor baru senilai US\$2,9 miliar khusus pasar barang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.</li> <li>- Menciptakan Impor baru yakni senilai US\$3,8 miliar (****)</li> </ul>

Sumber: (\*) Working Paper, Bank Indonesia (2015), (\*\*)Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional (2014), (\*\*\*) Kementerian Perdagangan (2016), (\*\*\*\*) Rosiding Seminar, Universitas Jember (2016),(\*\*\*\*\*) Koran Bisnis Indonesia,(2016).

Perjanjian TPP memiliki total PDB dari semua anggota TPP sebesar US\$17 triliun, dengan 85 persen diantaranya disumbangkan oleh Amerika Serikat. Total perdagangan barang dan jasa diantara negara anggota TPP sebesar US\$ 7 triliun, dan 60 persen di antaranya merupakan sumbangan dari Amerika Serikat. Indonesia akan diuntungkan dengan TPP, keuntungan yang akan dinikmati oleh Indonesia apabila bergabung dengan TPP adalah pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat sebesar 1,7 persen, dengan komposisi pertumbuhan sebesar dua per tiga (1,1 persen) dihasilkan dari keuntungan efek perdagangan dan sepertiga (0,6 persen) dihasilkan dari keuntungan efek *Foreign Direct Investment* (FDI). Keuntungan ini jelas berasal dari terbuka akses pasar ke Amerika Serikat dan negara-negara yang melakukan negosiasi TPP. Cakupan TPP adalah sektor pertanian, tekstil dan pakaian jadi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), jasa dan investasi, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan.<sup>84</sup>

Seperti apa yang dikatakan oleh World system theory dari Wallerstein, sistem kapitalis dunia memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh negara dunia ketiga atau negara berkembang agar dapat “naik kelas”. Indonesia setidaknya dapat memanfaatkan peluang untuk naik kelas tersebut dalam tingkatan level negara menurut Wallerstein. Indonesia juga menggunakan beberapa cara yang ditawarkan oleh World System Theory yaitu dengan strategi berdikari.

---

<sup>84</sup> Siaran Pers, “Indonesia Masih Pertimbangkan Keitsertaannya dalam *Trans-Pasific Partership*”, (Kementrian Perdagangan) tersedia di [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) [Diakses pada 13 januari 2017]

Strategi berdikari atau terlepas dari dominasi pusat yaitu dengan cara pemerintah Indonesia harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk dapat mengembangkan teknologi industri domestik. Dengan peningkatan penguasaan teknologi domestik Indonesia, maka produk industri dalam negeri akan dapat bersaing ditengah pasar global yang sedang berjalan. Dengan bertahannya industri domestik, maka pendapatan nasional sebuah negara akan berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi. Surplus pertumbuhan ekonomi dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan oleh tiap proses pembangunan.<sup>85</sup> Indonesia juga harus memperkuat fondasi komoditi ekspor terutama dalam industri tekstil dan dapat menjualnya di dalam pasar internasional. Akses pasar didalam perjanjian TPP terdapat penghapusan tarif dan non tarif hambatan dan kuota pada pertanian, tekstil, pakaian, dan otomotif sehingga TPP dapat menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi kelasnya. Oleh karena itu industri tekstil ialah salah satu alternative bagi negara dunia ketiga Khususnya Indoneisa untuk dapat memanfaatkan celah di dalam sistem perekonomian global seperti *Trans-Pacific Partnership*. Jika Indoneisa berhasil dalam perdagangan internasional *Trans-Pacific Partnership*, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan naik kelas menurut Worl System Theory.

---

<sup>85</sup>Immanuel Wallerstein.1973." *Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation Within The Capitalist World Economy*". (Makalah disampaikan dalam Conference on Dependence and Development in Africa, Ottawa, Canada)